

PERAN PERBEKEL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA LOKAPAKSA KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Oleh : Made Suarsana¹ dan Ni Ketut Sudianing²

Abstraksi

Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan umum yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup di masa depan. Perbekel sebagai orang nomor satu di desa adalah pemimpin yang mempunyai peran strategis untuk memotivasi warganya agar datang ke TPS saat Pemilihan Umum.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1) bagaimanakah peran perbekel sebagai motivator dan komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ? ; 2) faktor-faktor apa sajakah yang menghambat perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ? ; 3) bagaimanakah solusinya agar partisipasi politik masyarakat dapat meningkat ?

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa adalah dengan datang ke TPS lebih awal saat Pemilu, peningkatan kualitas SDM perangkat desa, memberikan stimulus, menciptakan lapangan pekerjaan, menambah intensitas sosialisasi yang melibatkan kaum intelektual dan tokoh masyarakat serta menyediakan pelayanan komunikasi yang dapat dipercaya oleh seluruh *stakeholder*. Faktor-faktor yang menghambat perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan solusi dalam meminimalisasi faktor penghambat tersebut adalah peningkatan kualitas SDM perangkat desa dan masyarakatnya, merubah cara komunikasi dan memperkuat regulasi yang menyangkut tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam memilih pemimpin.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, kepemimpinan

¹ Staf Kantor Kepala Desa, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, email madamketut@icloud.com

² Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email ketut.sudianing@unipas.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional sebagai sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial yang lebih baik, atau yang lebih modern, jelas merupakan gejala sosial yang multi dimensi dan dapat didekati dari berbagai ilmu pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, pembangunan hukum, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, administrasi pembangunan dan sebagainya. Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian majemuk dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, dimana pembangunan itu ditujukan untuk mewujudkan

masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik, “peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dapat mendorong keterbukaan publik (Sudianing dan Seputra, 2019: 112). Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung juga oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan politik di Indonesia adalah tingkat partisipasi politik masyarakat, artinya sejauh mana masyarakat terlibat secara langsung dalam proses politik. Keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak kepada kehidupan mereka di kemudian hari menjadi sangat penting diwujudkan sebagai esensi dari demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk nyata dari demokrasi, dimana rakyat berpesta untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya intimidasi dari orang lain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Bab II pasal 2 yang berbunyi : Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Undang-undang telah menjamin hak-hak setiap warganegara termasuk dalam memilih pemimpin pada setiap pemilihan yang diselenggarakan, namun faktanya masih banyak orang yang enggan datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara dan kondisi ini terjadi bukan hanya di kota tapi juga di desa-desa termasuk Desa Lokapaksa dengan jumlah penduduk sekitar 13.285 jiwa memiliki Daftar Pemilih Tetap 8952 orang, hanya 7072 orang saja (79%) yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yang lalu dan sisanya 1880 orang(21%) tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Fenomena golput terjadi pada setiap hajatan politik, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif tingkat pusat dan tingkat daerah serta pemilihan gubernur, bupati atau walikota.

Perbekel sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan di Desa selama ini belum terlihat jelas perannya dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan sosialisasi dan motivasi politik, serta mengembangkan demokrasi. Ini tercermin dari

tingginya angka golput dalam setiap hajatan politik. Seperti yang terjadi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, menurut data yang diperoleh dari Petugas Pemungutan Suara (PPS) Desa Lokapaksa sebagai berikut :

Tabel 01.
Prosentase Golput pada Pemilu di Desa Lokapaksa

NO	KEGIATAN/TH	DPT	HADIR		TDK HADIR	
			JML	%	JML	%
1	PILBUP BULELENG 2017	8611	4736	55	3875	45
2	PILGUB BALI 2018	8715	5664	65	3051	35
3	PILPRES 2019	8952	7072	79	1880	21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka golput masih sangat tinggi meskipun terjadi penurunan. Pada ajang Pemilihan Bupati Buleleng yang diselenggarakan pada tahun 2017, dari total Daftar Pemilih Tetap sebesar 8611 yang menggunakan hak pilihnya hanya 4736 orang atau (55%) saja, sementara sisanya 3875 orang atau (45%) tidak memilih. Lalu kemudian pada Pemilihan Gubernur Bali yang diselenggarakan pada tahun 2018 total DPT 8715 yang memilih 5664 orang atau 65%, yang tidak memilih sebesar 305 orang atau 35%. Yang terakhir Pemilihan Presiden dan Legislatif pada tahun 2019 kemarin dari jumlah DPT 8952 yang memilih sebesar 7072 orang atau 79% dan yang tidak memilih sebesar 1880 orang atau 21%. Secara umum memang ada penurunan jumlah golput namun harus diakui bahwa hal ini belum sesuai dengan harapan kita bersama dan perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Setelah mencermati permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran perbikel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa.

Merujuk kepada uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Perbikel sebagai motivator dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu di Desa Lokapaksa ?
2. Bagaimanakah Peran Perbikel sebagai komunikator dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu di Desa Lokapaksa ?

3. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Perbekel Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Lokapaksa?
4. Bagaimanakah solusinya agar Partisipasi Politik Masyarakat dapat meningkat?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Arikunto (2009) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kata-kata. Sedangkan menurut Bungin (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik tentang masalah yang diteliti, sehingga informan dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sutopo (2002: 50) “Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya”. Bertindak sebagai informan adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang dikaji peneliti, serta bersedia memberi informasi kepada peneliti, informan dalam penelitian ini terutama Perbekel Desa Lokapaksa, Sekretaris Desa, Kasi/Kaur, KBD, LPM, Staf dan masyarakat. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang diteliti.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2007 : 10). Menurut Moleong (2008 : 28), fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat “*emercial induktif*” (kenyataan dan induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Peran perbekel sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang meliputi :
 - a. Memberi contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat

- b. Menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi masyarakat
 - c. Memberikan rangsangan dan dorongan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
2. Peran perbikel sebagai komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang meliputi : komunikasi verbal dan komunikasi non verbal.
 3. Faktor penghambat Perbikel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang meliputi: Faktor internal dan faktor eksternal.
 4. Solusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang meliputi :
Solusi internal dan solusi eksternal

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepala Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Peneliti sengaja memilih lokasi penelitian ini karena beberapa alasan yaitu : Kantor Kepala Desa Lokapaksa merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyediakan cukup data yang dibutuhkan untuk diteliti sehingga memungkinkan untuk hasil penelitian. Dan belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian di tempat tersebut. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Selanjutnya analisis data mengikuti teori yang disampaikan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yakni analisis data dengan empat tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Perbikel sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

Kepala desa atau di Bali disebut dengan Perbikel menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai seorang pemimpin, seorang Perbikel dituntut untuk berperan aktif dalam membangun Desa. Pada saat seseorang dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan peran.

Secara umum, Pemerintah Desa Lokapaksa sudah berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pembangunan politik.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan yang berhasil diwawancarai, dapat diketahui bahwa Perbekel Desa Lokapaksa bersama Perangkat Desa Lokapaksa sudah berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan. terbukti Perbekel Desa Lokapaksa selalu hadir ke TPS lebih awal untuk memotivasi masyarakatnya dan memberi contoh bagaimana menjadi warga negara yang baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Covey (2004 : 108) peran pemimpin yang baik adalah memberi contoh yang baik (*Modelling*). Sebagai seorang pemimpin, perbekel dibebani tugas dan tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan dengan bawahannya. Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta (Sinambela, 2013 :114). Selanjutnya pemimpin mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas. Oleh sebab itu pemimpin memiliki perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dan lingkungannya. Pemimpin harus dapat memengaruhi perilaku bawahannya agar apa yang diperintahkannya senantiasa dapat dilaksanakan oleh bawahannya.

Dalam rangka upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dibutuhkan sebuah strategi yang tepat agar usaha tersebut menjadi efektif. Langkah-langkah yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan dan pemeriksaan beberapa dokumen, dapat diketahui bahwa Perbekel Desa Lokapaksa bersama jajarannya telah melakukan usaha berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa, hal ini dapat dilihat dari tindakan Perbekel Desa Lokapaksa yang menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi masyarakat yang ditandai dengan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan Kelian adat dalam kegiatan sosialisai tersebut. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rivai (2008 : 455) Pengertian motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi untuk mencapai hasil yang spesifik sesuai dengan tujuan

individu. Motivasi menekankan pada bagaimana menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi bawahan agar mau bekerjasama secara produktif sehingga berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi.

Tujuan menjadi kata kunci dalam motivasi, tanpa adanya tujuan yang jelas maka segala yang dilakukan menjadi sia-sia. Berdasarkan keterangan beberapa informan, maka dapat dimengerti bahwa upaya-upaya untuk mendorong dan merangsang masyarakat agar tidak golput dilakukan dengan cara mengedukasi mereka supaya memahami tujuan dari Pemilu tersebut, dan ini perlu dilakukan secara berkala dan materi yang disajikan lebih spesifik dan tidak membosankan. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mc.Donald (2011 : 74) motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. Sesuai juga dengan yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah (2012 :76) kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.

3.2 Peran Perbikel sebagai komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Salah satu kelebihan dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kecakapan dalam berkomunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampain pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dan menghasilkan efek. Perbikel sebagai pemimpin di desa dituntut supaya mampu berkomunikasi dengan baik dengan warganya sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Dalam konteks partisipasi politik, Perbikel Desa Lokapaksa melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat dan staf di Kantor Desa Lokapaksa agar bisa meminimalisir angka golput.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat dipahami bahwa komunikasi dilakukan secara verbal melalui tatap muka secara langsung dan dialog dengan masyarakat guna menyamakan persepsi tentang pentingnya keterlibatan setiap warga negara dalam Pemilu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Effendi (2009 : 82) Jika komunikasi dengan bahasa disebut dengan

komunikasi Verbal (*verbal communication*). Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan media dan menimbulkan efek, artinya selain komunikasi secara langsung dengan berbicara dan bertatap muka antara dua orang atau lebih, ada juga komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui cara komunikasi yang dilakukan oleh Perbekel Desa Lokapaksa. Selain menggunakan komunikasi verbal juga dilakukan komunikasi menggunakan media seperti tulisan, gambar dan media sosial. Ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Effendi (2009 : 82) selain menggunakan bahasa sebagai alat dalam proses komunikasi, pada kenyataan dan situasi tertentu digunakan juga lambang-lambang lain, diantaranya gerak isyarat (*gesture*) dengan salah satu anggota tubuh (misalnya tangan, mata, bibir, dan lain-lain), gambar (foto, film, lukisan, diagram dan sebagainya, warna dan lain sebagainya. Jika komunikasi dengan bahasa disebut dengan komunikasi Verbal (*verbal communication*), maka komunikasi dengan menggunakan lambang yang bukan bahasa dinamakan komunikasi non verbal (*non verbal communication*). Selain melakukan komunikasi dengan warga, Pemimpin juga perlu melakukan komunikasi dengan stafnya berkaitan dengan perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu dilakukan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan bawahan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Effendi (2009 : 79) komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu : Komunikasi Vertikal (*Vertical Communication*) yaitu komunikasi dari atas ke bawah (*up word communication*). Komunikasi Horizontal (*Horizontal Communication*), ini terjadi antara individu-individu dengan pegawai yang mempunyai status atau peringkat dalam struktur organisasi misalnya : komunikasi antar staf, komunikasi antar karyawan menengah. dan Komunikasi Cabang atau Diagonal (*Crosswise Communication*) merupakan kombinasi komunikasi vertikal dengan komunikasi horizontal dan merupakan komunikasi individu atau karyawan yang berbeda pangkat atau status dan juga berbeda bagian atau departemen.

3.3 Faktor penghambat Perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal, maka perlu dilakukan suatu usaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui faktor internal yang menghambat Perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni Pendidikan yang rendah kemudian jenis pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan minim dan usia remaja dan lansia. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sunarti (2010 : 114) faktor internal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah : umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan.

Selain faktor internal seperti yang sudah diuraikan diatas terdapat juga faktor eksternal. Dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui faktor eksternal yang menghambat Perbekel Desa Lokapaksa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni intensitas sosialisai dari pemerintah yang masih rendah, karena sosialisasi yang aktif dari pemerintah akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, kemudian minimnya stimulus dari pemerintah, dan adanya pengaruh masyarakat dari luar juga bisa menghambat tingkat partisipasi politik masyarakat serta topografi desa yang tidak mudah dijangkau akan berkontribusi menghambat tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lokapaksa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sunarti (2010 : 115) faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah intensitas sosialisasi, stimulus dari pemerintah atau pihak luar, keaktifan fasilitator dan pengaruh masyarakat dari luar.

3.4 Solusi dalam meminimalisir faktor penghambat peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Untuk meminimalisir hambatan yang bisa menyulitkan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh Perbekel Desa Lokapaksa. Solusi internal yang dilakukan adalah dengan menambah alokasi dana untuk pemberdayaan, meningkatkan kapasitas pegawai di Kantor Desa dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan edukasi bagi remaja yang belum pernah memilih dalam pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan, maka dapat diketahui solusi internal yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni dengan menambah anggaran, peningkatan kapasitas Perangkat Desa, menciptakan lapangan pekerjaan dan melaksanakan sosialisasi secara rutin, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sukarno (2010 : 78) bahwa aspek internal dalam kepemimpinan yaitu identik dengan ketatalembagaan yang banyak mendapat perhatian adalah tentang bagaimana keadaan organisasi, gerakannya, keadaannya, tuntutannya serta apakah tujuan organisasi. Kemudian usaha yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan eksternal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan menambah frekuensi sosialisasi ke banjar-banjar dan melakukan komunikasi ke atas dan ke bawah dan memberikan stimulus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang informan dapat diketahui solusi yang dilakukan Perbekel dalam meminimalisir hambatan eksternal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu melalui perbaikan sistem informasi manajemen di Desa Lokapaksa guna memastikan informasi yang diterima dan disampaikan lebih terpercaya dan bukan berita bohong, kemudian Perbekel juga berkomunikasi dengan Perangkat Desa, atasan dan juga masyarakat dalam rangka menyamakan persepsi berkaitan dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa serta lebih sering mengadakan sosialisasi politik ke banjar-banjar. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sukarno (2010 : 78) aspek eksternal atau aspek politik adalah seorang pemimpin harus melihat perkembangan situasi masyarakat yang ada di luar lingkungan organisasi.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari uraian yang disampaikan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran Perbekel sebagai motivator dan komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Lokapaksa meliputi tindakan memberi contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat, menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi masyarakat, memberikan rangsangan dan dorongan kepada masyarakat, penyampaian informasi yang terpercaya, membuka ruang dialog dengan masyarakat. ini bertujuan untuk menekan angka golput di Desa Lokapaksa yang masih tinggi.
2. Faktor internal penghambat Perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni kualitas SDM Pemerintah Desa dan masyarakatnya, tingkat pendidikan yang rendah, penghasilan sedikit dan tidak tetap serta usia remaja dan lansia. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi stimulus dari pemerintah, kapasitas dan kapabilitas pemimpin yang kurang memadai, serta kurangnya intensitas sosialisasi serta adanya pengaruh masyarakat dari luar.
3. Solusi dalam meminimalisir hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Desa dan masyarakat, pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional, menciptakan lapangan kerja dan memberikan bantuan modal bagi pengusaha kecil dan menengah, pemberian layanan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, komunikasi ke atas dan ke bawah serta melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.

4.2 Saran-saran

Mengacu pada simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran berikut ini :

1. Peran Perbekel sebagai motivator dan komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat hendaknya didukung oleh sumberdaya yang mumpuni dan melibatkan elemen penting seperti kaum intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Perbekel mestinya berusaha merubah pola komunikasi dan sosialisasi yang selama ini dirasa kaku dan monoton, harus dicari pola yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akan dilibatkan sehingga pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan baik dengan demikian apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai.
3. Adanya regulasi baru yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana memilih pemimpin bukan hanya merupakan hak tapi harus dijadikan sebagai kewajiban setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, Raja Grafindo : Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis keArah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.
- Hendarso, Emy Susanti, 2007, *Metode Penelitian sosial, Berbagai alternative Pendekatan Dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed) Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya : Bandung
- Sinambela, Lijan Poltak, 2013, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Soekarno, K., 2010, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar : Jakarta
- Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019. "Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah". Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019. FISIP UNIPAS
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung.
- Sunarti, 2010, *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Veitsal Rivai, Bahtiar dan Boy Rafli Amar, 2008, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Zakub, Hamzah, 2012, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, CV. Diponegoro : Bandung.